

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang kian meningkat dan ditunjang dengan banyaknya perusahaan-perusahaan yang berdiri di Indonesia menyebabkan setiap perusahaan bersaing dengan yang lainnya. Untuk dapat ikut berpartisipasi dalam persaingan, suatu perusahaan dituntut memiliki kinerja yang baik. Dalam menghadapi persaingan tersebut perusahaan membutuhkan dana yang dapat diperoleh dari investor. Oleh karena itu, agar investor bersedia menanamkan dananya di perusahaan maka perusahaan harus menyediakan informasi berupa laporan tahunan untuk menginformasikan kondisi perusahaan sehingga membantu investor dalam mengambil keputusan.

Laporan tahunan perusahaan diharapkan dapat diungkapkan secara jelas agar dapat dipertanggungjawabkan, diperbandingkan, mempermudah dalam melakukan analisis baik oleh pelanggan, pemasok, kreditor dan terutama investor (Gamayuni, 2009). Selain itu agar laporan tahunan konsisten dalam aplikasi dan interpretasi, memiliki keseragaman dalam informasi yang disajikan, dan menyajikan rerangka konseptual yang sama, maka diperlukan standar akuntansi yang di Indonesia dikenal dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Dengan adanya standar akuntansi yang diterapkan di Indonesia, maka laporan tahunan yang diterbitkan

perusahaan disusun berdasarkan kerangka berpikir yang sama. Hal ini mempermudah pengguna laporan tahunan untuk melakukan analisis komparatif satu perusahaan dengan perusahaan lainnya.

Selama beberapa tahun, beberapa negara mengandalkan standar akuntansi negara mereka masing-masing seperti Kanada, Jepang, Jerman, Amerika Serikat, dan negara lainnya. Mulai tahun 1974 Indonesia memilih untuk mengacu pada standar Amerika Serikat yang disebut *United State-Generally Accepted Accounting Principles* (US-GAAP) yang diterbitkan oleh *Financial Accounting Standards Board* (FASB), hal tersebut dikarenakan perkembangan ekonomi Amerika masih dijadikan sebagai patokan perkembangan bisnis dunia. Namun dengan perkembangan zaman pengguna, laporan tahunan dari Indonesia pun tidak hanya dari Amerika Serikat melainkan negara lainnya juga (internasional). Maka dari itu pada tahun 2006 Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) sebagai pihak yang mengatur standar keuangan di Indonesia, berkomitmen untuk mengubah poros ekonomi dari yang berbasis Amerika Serikat menjadi Internasional, dan mulai mengikuti *International Financial Reporting Standards* (IFRS) (Gamayuni, 2009) yang diterbitkan oleh *International Accounting Standards Board* (IASB). Indonesia tidak mengadopsi secara keseluruhan isi dari IFRS melainkan menyatukan dengan keadaan Indonesia sendiri yang disebut konvergensi. Pada tahun 2006-2008, konvergensi IFRS Tahap 1 dilaksanakan. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) mencanangkan bahwa IFRS akan mulai berlaku di Indonesia pada tahun 2012 secara keseluruhan atau *full*

*adoption* terhadap konvergensi IFRS (Ikatan Akuntan Indonesia, 2010).

Perubahan standar ini tentu memiliki konsekuensi karena karakteristik IFRS adalah *principle based*, berbeda dengan US-GAAP yang *rule based*. Salah satu perubahan prinsip yang sangat signifikan adalah penilaian aset yaitu penggunaan *historical cost* pada US-GAAP dan *fair value based* pada IFRS. Selain konsekuensi, konvergensi IFRS juga memberikan manfaat. Ketua Tim Implementasi IFRS-IAI Dudi M Kurniawan mengatakan, dengan mengadopsi IFRS, Indonesia akan mendapatkan tujuh manfaat sekaligus, yaitu (1) meningkatkan kualitas SAK, (2) mengurangi biaya SAK, (3) meningkatkan kredibilitas dan kegunaan laporan keuangan, (4) meningkatkan komparabilitas pelaporan keuangan, (5) meningkatkan transparansi keuangan, (6) menurunkan biaya modal dengan membuka peluang penghimpunan dana melalui pasar modal, (7) meningkatkan efisiensi penyusunan laporan keuangan (Standar Internasional Dipakai 2012, 2010).

Dengan mengikuti IFRS, berarti laporan tahunan perusahaan Indonesia telah menggunakan bahasa global sehingga mudah dipahami oleh pasar global. Perusahaan di Indonesia akan memiliki daya saing lebih dan mempermudah dalam melakukan transaksi lintas negara termasuk merger dan akuisisi. Telah banyak perusahaan di Indonesia yang mengalami akuisisi dan merger lintas Negara, misal akuisisi Philip Morris terhadap Sampoerna pada tahun 2005. Konvergensi IFRS ini tidak hanya diperlukan oleh Indonesia

melainkan juga merupakan kewajiban karena Indonesia termasuk anggota G-20. G-20 merupakan kelompok 19 negara dengan perekonomian besar di dunia ditambah dengan Uni Eropa. Hal ini menjadi kewajiban bagi anggota G-20 untuk mengurangi kesenjangan aturan di Negara-Negara anggota G-20 yang mayoritas telah menggunakan IFRS seperti Australia, Meksiko dan negara lainnya. Maka dari itu dibentuklah badan yang mengatur kegiatan sektor jasa keuangan di Indonesia yang disebut dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). OJK bertugas sebagai lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum. Selain itu OJK juga memiliki fungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan, termasuk tentang kewajiban penyusunan laporan keuangan bagi perusahaan yang *go public* sesuai dengan SAK (Tugas dan Fungsi, 2013).

OJK juga mengatur perusahaan-perusahaan yang terdaftar di BEI, dan mewajibkan perusahaan menyusun laporan tahunan berdasarkan SAK dan beberapa aturan laporan tahunan yang diterbitkan OJK. Apabila perusahaan melanggar akan dikenakan sanksi yang berlaku. Pada tahun 2011, OJK mengenakan sanksi berupa denda administratif ke beberapa perusahaan yang melanggar seperti pada PT Bakrie & Brothers Tbk (BNBR), PT Petromine

Energy Trading dikarenakan salah pengungkapan dalam neraca konsolidasian (Prayogi, 2011), namun prakteknya masih ada beberapa perusahaan yang belum memenuhi standar pengungkapan wajib konvergensi IFRS. Hal ini dapat dilihat dari hasil beberapa penelitian dimana perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2009 dan 2010 hanya mengungkapkan *list* pengungkapan wajib konvergensi IFRS yang dipublikasikan oleh Deloitte sebesar 72,203% (Utami, Suhardjanto dan Hartoko, 2012). Hal serupa juga nampak dari penelitian lain yang menunjukkan rerata tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS untuk perusahaan jasa yang terdaftar di BEI pada tahun 2009 dan 2010 adalah 69,9% (Prawinandi, Suhardjanto, dan Triatmoko, 2012). Dari kondisi tersebut terlihat bahwa perusahaan publik yang harusnya menyusun laporan tahunan sesuai dengan standar pengungkapan wajib konvergensi IFRS, masih belum melakukan sepenuhnya, padahal hal ini sangat diperlukan sebagai alat untuk menyampaikan informasi pada *stakeholders*. Hal tersebut mendasari mengapa penelitian ini dilakukan.

Objek penelitian adalah perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI. Indonesia akan menghadapi AEC (*ASEAN Economic Community*) pada tahun 2015 mendatang, dan diharapkan perusahaan mampu bersaing dengan perusahaan lain. Oleh karena itu diperlukan adanya modal yang besar untuk mendukung ekspansi ke bank nasional besar dengan cara merger antar perusahaan perbankan (Bank BUMN Harus Merger Songsong 2020, 2014). Aturan

penggabungan perusahaan atau merger terdapat pada pasal 123 UUPT jo Pasal 7 PP 27/1998 yang salah satunya disebutkan bahwa neraca proforma Perseroan yang menerima penggabungan harus sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia (Kusumasari, 2011). Pemerintah diharapkan dapat memberi contoh riil tentang kepatuhan pengungkapan wajib yang dilakukan melalui perusahaan perbankan. Periode penelitian adalah tahun 2012 hingga tahun 2013 dimana periode data tersebut merupakan periode perusahaan terbaru sehingga data tersebut relevan untuk diteliti dan mencerminkan perusahaan perbankan di Indonesia saat ini serta IAI mencanangkan bahwa tahun 2012 akan dilakukan *full adoption* terhadap konvergensi IFRS.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang, maka rumusan masalah penelitian: “Bagaimana tingkat kepatuhan pengungkapan wajib konvergensi IFRS pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2012-2013?”

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui tingkat kepatuhan pengungkapan wajib dalam konvergensi IFRS perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2012-2013.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan manfaat antara lain:

##### **1. Manfaat akademik**

Dapat digunakan sebagai acuan atau pembandingan untuk penelitian selanjutnya dengan topik yang sama mengenai tingkat kepatuhan pengungkapan wajib laporan tahunan konvergensi IFRS pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI.

##### **2. Manfaat praktik**

- a. Memberikan masukan bagi OJK untuk mengetahui tingkat pengungkapan yang dilakukan perusahaan perbankan sehingga dapat bertindak tegas apabila perusahaan tidak memenuhi ketentuan untuk melindungi investor.
- b. Memberi masukan bagi perusahaan perbankan agar lebih dapat memahami pengungkapan agar investor dapat memahami kondisi perusahaan.

#### **1.5. Sistematika Penulisan**

Skripsi ini disusun secara keseluruhan yang terdiri dari lima bab. Uraian ide pokok yang terkandung pada masing-masing bab adalah sebagai berikut:

##### **BAB 1 : PENDAHULUAN**

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menjelaskan mengenai penelitian terdahulu, landasan teori yang berkaitan dengan penelitian, dan rerangka berpikir.

**BAB 3 : METODE PENELITIAN**

Bab ini terdiri dari desain penelitian; jenis data dan sumber data; metode pengumpulan data; populasi, sampel dan teknik pengambilan sampel; dan teknik analisis data.

**BAB 4 : ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menguraikan karakteristik objek penelitian, deskriptif data, analisis data, serta pembahasan dari hasil penelitian.

**BAB 5 : SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN**

Bab ini berisi simpulan yang diperoleh dari analisis dan pembahasan, keterbatasan penelitian serta saran-saran yang bermanfaat bagi penelitian selanjutnya.